

TESIS

**PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN ANTAR
PENYELENGGARA DAN PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN
SISTEM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**Frengki Budi Wijaya
NIM. 2220216310062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN ANTAR
PENYELENGGARA DAN PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN
SISTEM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA**

**Tesis
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
FRENGKI BUDI WIJAYA, S.H
2220216310062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 08 Agustus 2024

PEMBIMBING



Lena Hanifah

NIP : 19810321 200912 2 003

Diketahui Oleh
Ketua Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Hj. Rahmida Erliyani

NIP : 19730420 200312 20002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum



Achmad Faishal
NIP: 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frengki Budi Wijaya

NIM : 2220216310062

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Judul Tesis : PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP
PERJANJIAN ANTAR PENYELENGGARA DAN PENERBIT
DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM *SECURITIES*
CROWDFUNDING DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 08 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Frengki Budi Wijaya, SH

2220216310062



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 517/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Frengki Budi Wijaya

Dengan Judul Tesis :

Perbandingan Peran Notaris Terhadap Perjanjian Antar Penyelenggara dan Penerbit
Dalam Pasar Modal dan *System Securities Crowdfunding* di Indonesia

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarnasin, 21 Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



RINGKASAN

PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN ANTAR PENYELENGGARA DAN PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM *SECURITIES CROWDFUNDING* DI INDONESIA

Oleh :

Frengki Budi Wijaya,¹ Lena Hanifah²

Inovasi perkembangan dalam bidang keuangan ini sering disebut dengan teknologi finansial/*finansial technology (fintech)*. Akibat adanya perkembangan *e-commerce* di Indonesia, maka memberi pengaruh yaitu muncul pula startup *fintech* dengan beragam bentuk berkembang di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah *securities crowdfunding* sebagai bentuk penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagai bentuk mini-IPO yang mirip seperti di Pasar Modal. Dunia pasar modal dinyatakan bahwa Notaris sebagai profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kehadiran peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan dalam membuat akta-akta notariil yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam mengikat melalui perjanjian pada para pihak. Peran Notaris lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dengan munculnya inovasi *securities crowdfunding*, kehadiran Notaris juga diperlukan dalam sistem *Securities Crowdfunding* yang memiliki hubungan hukum antara para subjek hukum dalam sistem *Securities Crowdfunding* yaitu pihak penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Notaris bertanggung jawab dalam membuat perjanjian penyelenggara layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut adalah akta pengakuan hutang. Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitor dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang yang disebut dengan istilah *grosse* akta. *Grosse* akta adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga penelitian ini dibuat atas dasar untuk memahami perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial *Grosse* Akta yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities Crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia. Hal ini dikarenakan kedudukan notaris pada pasar modal konvensional dengan notaris pada sistem *Securities Crowdfunding* memiliki perbedaan. Dimana notaris yang beroperasi dalam pasar modal haruslah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum teoritis yang dikaitkan dengan perundang-undangan terhadap isu hukum yaitu untuk

¹ NPM : 2220216310062

² Pembimbing

memahami perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial *Grosse Akta* yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities Crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan literatur lainnya, serta menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang pada kedudukan peran Notaris pada Pasar Modal dan *Securities Crowdfunding* di Indonesia dan pelaksanaan *grosse akta* pengakuan hutang sebagai bentuk dari pelaksanaan perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan Peran Notaris terhadap Perjanjian Antara Penyelenggara dan Penerbit dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang dilakukan. Perbandingan Peran Notaris Pada pembuatan perjanjian antara penyelenggara dan penerbit dalam pasar modal adalah pada proses penerbitan efek bersifat hutang dimasukkan dalam RUPS yang dibuat Notaris pada Pasar Modal dan adanya bank umum selaku wali amanat sebagai pemegang *grosse akta* pengakuan hutang, sedangkan peran notaris SCF untuk membuat perjanjian antara penyelenggara dan penerbit tersebut dalam akta pengakuan hutang yang diserahkan dalam bentuk *grosse akta* pengakuan hutang kepada pihak perusahaan penyedia layanan selaku penerbit dan perwakilan investor. Serta dibedakan pengaturan terkait dasar Hukum Notaris pasar modal memiliki STTD selaku peran penunjang pasar modal yang kemudian tidak dimiliki notaris yang melakukan kegiatan di SCF.
2. Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari *grosse akta* yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia dipengaruhi dari pembuatan bentuk akta pengakuan hutang yang disesuaikan dengan dasar hukum pembentukan pasal 224 HIR/258 RBg dengan kedudukan Notaris yang membuatnya dalam keperluan untuk Pasar Modal dan *Securities Crowdfunding*. Dimana kedudukan Hukum Notaris Pasar Modal memiliki kualifikasi dalam pemahaman mendalam terkait pasar modal yang dilandasi STTD peran penunjang pasar modal sedangkan Notaris SCF tidak memiliki ketentuan yang sama dalam melakukan kegiatan pembuatan akta pengakuan hutang.

Banjarmasin, 08 Agustus 2024

Penulis,



Frengki Budi Wijaya, S.H

2220216310062

PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN ANTAR
PENYELENGGARA DAN PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM
SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA

ABSTRAK

Oleh :

Frengki Budi Wijaya,³ Lena Hanifah⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Akta Pengakuan Hutang, Pasar Modal, *Securities Crowdfunding*.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti peran Notaris baik di Pasar Modal maupun *Securities Crowdfunding* (SCF) dalam melakukan penawaran efek di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisa perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial *Grosse* Akta yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities Crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia.. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan mendasar antara peran antara Notaris di Pasar Modal dan Notaris dalam sistem *Securities Crowdfunding* terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang terjadi. Peran Notaris pada pembuatan perjanjian antara penyelenggara dan penerbit dalam pasar modal adalah pada proses penerbitan efek bersifat hutang dimasukkan dalam RUPS yang dibuat Notaris pada Pasar Modal dan adanya bank umum selaku wali amanat sebagai pemegang *grosse* akta pengakuan hutang, sedangkan peran notaris SCF untuk membuat perjanjian antara penyelenggara dan penerbit tersebut dalam akta pengakuan hutang yang diserahkan dalam bentuk *grosse* akta pengakuan hutang kepada pihak perusahaan penyedia layanan selaku penerbit dan perwakilan investor. Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari *grosse* akta yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia dipengaruhi dari pembuatan bentuk akta pengakuan hutang yang disesuaikan dengan dasar hukum pembentukan pasal 224 HIR/258 RBg dengan kedudukan Notaris yang membuatnya dalam keperluan untuk Pasar Modal dan *Securities Crowdfunding*. Dimana kedudukan Hukum Notaris Pasar Modal memiliki kualifikasi dalam pemahaman mendalam terkait pasar modal yang dilandasi STTD peran penunjang pasar modal sedangkan Notaris SCF tidak memiliki ketentuan yang sama dalam melakukan kegiatan pembuatan akta pengakuan hutang.

³ NPM : 2220216310062

⁴ Pembimbing

**COMPARISON OF NOTARY'S ROLE UPON AGREEMENT BETWEEN
SECURITIES EXCHANGE AND ISSUER IN CAPITAL MARKET AND
SECURITIES CROWDFUNDING SYSTEM IN INDONESIA**

By

Frengki Budi Wijaya¹, Lena Hanifah²

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 112 pages

ABSTRACT

Keywords: Deed of Acknowledgement of Indebtedness, Capital Market, Securities Crowdfunding

This research is aimed at studying the Notary's role both at capital market and Securities Crowdfunding (SCF) in conducting offer of stocks in Indonesia, with the purpose to analyze the comparison of Notary's role in making deed of acknowledgement of indebtedness which has been regulated systematically in Financial Services Authority Regulation No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Crowdfunding at conventional capital market, as well as to study the execution implementation of Deed Grosse made by Notary in the world of Securities Crowdfunding and conventional capital market in Indonesia. This is normative legal research. Notary's role in the making of agreement between securities exchange and issuer in capital market is in the process of issuing the payable stocks included in the Shareholders' Meeting made by Notary in capital market, and the presence of general bank as trustee as holder of the deed grosse of acknowledgement of indebtedness. While Notary's role in SCF is to make agreement between securities exchange and issuer in deed of acknowledgement of indebtedness which is delivered in a form of deed grosse of acknowledgement of indebtedness to the service provider company as issuer or investor's representative. The evidentiary and execution power of deed grosse made by Notary in capital market and Securities Crowdfunding system in Indonesia is influenced by the making of the form of the deed of acknowledgement of indebtedness which is adjusted with the legal ground of the formulation of Article 224 HIR/258 R.Bg and with the Notary's position who makes it for the need of capital market and Securities Crowdfunding. The legal position of capital market Notary has qualification in possessing deep knowledge related to capital market based on STTD role as capital market supporter, while SCF Notary does not have the same provision in conducting activity of the making of deed of acknowledgement of indebtedness.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2220216310062

² Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih, anugerah dan berkat-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN ANTAR PENYELENGGARA DAN PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM *SECURITIES CROWDFUNDING* DI INDONESIA**. Sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan Tesis ini terutama kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis, maka dari itu ucapan terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu Lena Hanifah, S.H.,LL.M, M.PhD selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Bapak Jonkenedy, S.Pd.,M.Pd dan Ibu Yulensi Nihel sebagai orang tua dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini

8. Istri tercinta Tety Clorida, S.Kep.,Ns. yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 08 Agustus 2024



Frengki Budi Wijaya, SH

DAFTAR ISI

JUDUL	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
RINGKASAN	Vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Tinjauan Konseptual	13
a. Teori Kepastian Hukum	13
b. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Tinjauan Teoritik	16
a. Tinjauan Umum Notaris	16
b. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	19
c. Tinjauan Umum tentang <i>Securities</i>	21
d. Tinjauan Umum tentang <i>Securities Crowdfunding</i> ..	27
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Tipe Penelitian	31
3. Sifat Penelitian	31
4. Pendekatan Penelitian	32
5. Sumber Bahan Hukum	33
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	35

G. Sistematika Penulisan	36
BAB II PERBANDINGAN PERAN NOTARIS TERHADAP	
PERJANJIAN ANTAR PENYELENGGARA DAN	
PENERBIT DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM	
<i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> DI INDONESIA	38
A. Peran Notaris.....	38
1. Peran Notaris Dalam Pasar Modal	38
2. Peran Notaris dalam Sistem <i>Securities Crowdfunding</i> .	56
B. Dasar Perbandingan Notaris Pasar Modal dan Notaris	
<i>Securities Crowdfunding</i>	87
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI	
DARI GROSSE AKTA YANG DIBUAT OLEH	
NOTARIS DALAM PASAR MODAL DAN SISTEM	
<i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> DI INDONESIA.....	94
A. Grosse Akta Pengakuan Hutang	94
1. Akta Pengakuan Hutang	94
2. Perbandingan Bentuk Akta Pengakuan Hutang Pada	
Pasar Modal dan <i>Securities Crowdfunding</i>	103
B. Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari Grosse Akta	
Pengakuan Hutang	107
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	

